BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui dan menunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia telah mengatur hak setiap warga negara untuk menjalani kehidupan, mempertahankan keberlangsungan hidup, dan mendapatkan standar hidup yang layak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Selain itu, hak atas kehidupan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil terkait HAM. Lebih lanjut, ada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang memberikan pedoman mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi kehidupan masyarakat. Seluruh kerangka hukum ini mulai dari yang tertinggi yakni Undang-Undang Dasar sampai Peraturan Pemerintah bertujuan untuk melindungi HAM, termasuk hak untuk hidup, serta mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan melindungi kehidupan warga negara.

Upaya perlindungan terhadap hak hidup juga terlihat dari adanya sanksi berat bagi para pelaku kejahatan serius. Pemerintah, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengatur serta menetapkan

hukuman pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia atau yang berdampak besar pada ketertiban umum/masyarakat dan keamanan negara. Pidana mati tercantum di dalam KUHP yang diwarisi dari pemerintah kolonial, dan tetap demikian ketika dinasionalisasikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.[1] Pidana mati dalam KUHP lama tercantum dalam Pasal 10 KUHP, tetapi dalam KUHP itu sendiri tidak memuat pengertian tentang pidana mati secara jelas.[2] Selain dalam KUHP lama, hukuman mati juga diberlakukan pada kasus terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta kejahatan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada 2 Januari 2023, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang akan berlaku pada tahun 2026 dan menggantikan KUHP lama buatan Belanda. Setelah selama ini atau sekitar 77 tahun, rakyat Indonesia menggunakan konstitusi yang dibuat oleh pemerintahan Belanda pada masa penjajahan, yang biasa dikenal dengan KUHP Belanda atau dalam bahasa Belanda Wetboek van Strafrecht untuk Hindia Belanda. Saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misi dilakukannya pembaharuan KUHP adalah sebagai bentuk adaptasi

[1] Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 17.

[2] J. E. Sahetapy, 1979, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung, hlm. 24.

dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik dalam perkembangan bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia Internasional.[3]

Di dalam pembaharuan KUHP ini terdapat beberapa pengaturan baru yang menjadi perdebatan beberapa kelompok dan masyarakat, salah satunya pengaturan baru mengenai hukuman pidana mati. Sebenarnya penerapan hukuman pidana mati sendiri telah menjadi perdebatan antara kelompok abolionis dan retensionis. Isu penerapan pidana mati selalu bersinggungan dengan HAM tetapi disisi lain ada kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum sehingga seringkali HAM dikesampingkan demi alasan menjaga ketertiban umum. Dalam Kovenan Internasional yaitu Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) hukuman mati bertentangan dengan HAM, sehingga tidak lagi diperbolehkan dan hukuman mati juga sudah usang, tidak memiki efek jera dan angka kejahatan.[4] Indonesia sendiri masih memilih untuk menerapkan hukuman pidana mati bagi beberapa tindak pidana tertentu hal inilah yang menjadi pertentangan dan perdebatan dibeberapa kelompok. Kelompok atau masyarakat yang tidak setuju mendasarkan pada argumen bahwa dalam Pasal 28A UUD 1945 tertulis "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selain itu mereka juga

---

[3] Ainal Mardhiah, Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru,hlm.1https://pnbireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html , diakses 24 Oktober 2024.

[4] Satria Perdana, Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia, hlm.1 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di indonesia, diakses 24 Oktober 2024.

mendasarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui dan menjunjung tinggi HAM, tetapi dengan di berlakukannya pidana mati maka negara telah melanggar HAM yang paling dasar dan yang paling utama yakni hak untuk hidup.[5] Dengan di berlakukannya pidana mati, ada juga fakta bahwa jika terdapat kesalahan dalam penjatuhan putusan pidana mati maka orang yang telah dijatuhi hukuman tidak bisa dipulihkan kembali.[6]

Disisi lain masyarakat/kelompok yang setuju terhadap pidana mati mendasarkan pada argument bahwa pidana mati telah dinyatakan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Tetapi meskipun demikian konstitusi Indonesia tetap menjamin hak hidup sebagai hak fundamental, penerapan hukuman mati dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pendapat lain yang mendukung hukuman mati antara lain adalah pandangan bahwa hukuman tersebut merupakan bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan serius, serta sebagai langkah pencegahan terhadap kejahatan serupa dengan memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu masyarakat/kelompok yang setuju terhadap pidana mati juga mendasarkan pendapat bahwa dengan diberlakukannya pidana mati akan memberi efek takut bagi para pelaku lainnya

[5] Vieve Large Hamenda, 2013, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia 1 Oleh: Veive Large Hamenda 2," n.d.

[6] *ibid*

yang belum dihukum, dan pidana mati juga bisa mencegah terulangnya kembali tindak pidana yang sama. [7]

Adanya perdebatan 2 kelompok dan pandangan tersebut, pemerintah/negara berusaha menenegahi dengan pengaturan baru mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[8] Dalam pengaturan baru tersebut menempatkan pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok tetapi menjadi bersifat khusus dan alternatif yang dimana hakim ketika hendak menjatuhkan hukuman pidana mati harus dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana." Seperti tertulis dalam Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pengaturan baru ini menjadi konsep baru dan menarik untuk meredam perdebatan tentang hukuman pidana mati di Indonesia.

Pengaturan baru mengenai pidana mati juga menimbulkan permasalahan/perdebatan berkaitan dengan prosedur pelaksanaan masa percobaan 10 tahun, terkait siapa yang akan menilai mengenai sikap dan perbuatan terpuji narapidana dalam masa percobaan tersebut. Seperti tertuang dalam Pasal 100 ayat 4 "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana

---

[7] *Latuharhary*, "Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi - Komnas HAM", hlm.1https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html, diakses 24 Oktober 2024.

[8] *Muhammad Yasin*, "Jalan Tengah Hukuman Pidana Mati Ala Profesor Muladi", hlm.1 https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-tengah-hukuman-pidana-mati-ala-profesor-muladi-lt5f8cdd3c7c243/, diakses 24 Oktober 2024.

dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung." Kriteria sikap dan perbuatan terpuji tersebut juga menjadi permasalahan karena tidak ada pengaturan yang terperinci mengenai klasifikasi sikap dan perbuatan terpuji.[9] Selain itu, konsep baru dengan masa percobaan 10 tahun untuk menentukan apakah narapidana akan di eksekusi hukuman mati juga menuai perdebatan. Banyak anggapan bahwa dengan konsep masa percobaan justru membuat HAM bagi narapidana semakin tidak terpenuhi karena mereka dimungkinkan untuk menjalani 2 hukuman sekaligus yakni hukuman pidana penjara dan hukuman pidana mati.[10]

Hal-hal seperti ini yang perlu dikaji secara mendalam serta diperhatikan, agar perubahan pengaturan pidana mati semakin dapat melindungi HAM bagi narapidana. Hal terpenting dalam perubahan pengaturan hukuman pidana mati adalah apakah pengubahan aturan hukuman pidana mati tersebut telah memiliki perkembangan dalam perlindungan HAM atau belum, karena seperti kita ketahui pokok akar masalah dari penerapan hukuman pidana mati adalah dari segi HAM. Maka apabila didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memiliki perkembangan perlindungan HAM dalam hal hukuman pidana mati maka itu sudah lebih baik dan sesuai

---

[9] *Suci Amaliyah*, "KUHP Baru: Hukuman Vonis Mati Bisa Direvisi Bila Kelakuan Baik", hlm.1.https://www.nu.or.id/nasional/kuhp-baru-hukuman-vonis-mati-bisa-direvisi-bila-kelakuan-baik-4LIdK, diakses 25 Oktober 2024.

[10] Rahmansyah Fadhul Al karim Rambe,dkk., 2024, "Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia", *Journal on Education,* Volume 06 nomor 02 hlm. 14013–23.

dengan misi pembaharuan KUHP, hal itulah yang coba untuk saya dalami dalam penilitian ini, dengan melakukan penelitian yang berjudul Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu: Apakah pengaturan baru mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara pengaturan baru mengenai hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perkembangan perlindungan dari sisi HAM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai pidana mati ditinjau dari prespektif hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada khususnya ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah, agar dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan apabila di kemudian hari dilakukan pembenahan/perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada khususnya ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

b. Bagi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini dapat dijadikan tinjauan dan pandangan bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam membuat atau memperbaharui Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati ataupun peraturan peundang-Undangan lainnya yang berkatian dengan pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada khususnya ditunjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah ada dan pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penulisan hukum berjudul Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan karya ilmiah asli penulis. Sebagai perbandingan diajukan tiga penulisan hukum yang telah dilakukan berkaitan dengan topik ini, tiga penulisan hukum tersebut yaitu :

1. Ayu Catur Rizkia Regita Cahyaningtyas, 30301900064, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023. Judul Skripsi : “Tinjauan Yuridis Penjatuhan

Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana di Indonesia."

Rumusan masalah:

1. Bagaimana penjatuhan hukum pidana mati ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana penjatuhan hukum pidana mati ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia?
3. penjatuhan hukum pidana matı ditinjau dari perspektif hukum Islam?

Hasil penelitian: Hasil penelitian ini menujukan bahwa hukuman mati dinilai tidak efektif untuk menghapus kejahatan. Saat ini sekitar 170 negara telah menghapuskan hukuman mati, itu berarti masih ada sekitar 23 negara yang masih menerapkan hukuman mati dalam praktik hukumnya. Hak untuk hidup diakui oleh dunia dan tertuang dalam konstitusi Indonesia sebagai hak mutlak yang keberadaanya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pidana mati harus dilmpuskan karena beberapa alasan seperti: setelah hukuman mati dijatuhkan maka terpidana mati tidak bisa dihidupkan kembali, adanya diskriminuts: terhadap mereka yang dalam kondisi dan ekonomi yang lemah karena lebih sulit mendapatkan bantuan hukum. pidana mati sering digunakan daları sistem peradilan yang tidak adil dan berdasarkan keterbatasan bukti dan pendampingan hukum yang tidak memadai. pidana mati dinilai tidak efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan, hukuman mati ketap kali dijadikan sebagai alat politik.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun: Dalam skripsi pembanding pembahasan ditekankan hanya mengenai efektivitas dari hukuman mati dan juga alasan mengapa pidana mati harus dihapuskan, sedangkan dalam penelitian hukum yang akan saya susun menekankan pada pidana mati dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dan untuk mengetahui apakah pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memiliki perkembangan hak asasi manusia.

2. Harumi Pratika, B10019311, Universitas Jambi, Tahun 2023. Judul Skripsi: "Implikasi Yuridis Pengaturan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Pidana."

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana peingatuiran masa peircobaan dalam peilaksanaan huikuiman mati dalam Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 Teintang Kitab Uindang-Uindang Pidana?
2. Apa saja implikasi yuiridis dari peineirapan masa peircobaan dalam peilaksanaan huikuiman mati meinuiruit Pasal 100 Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 Teintang Kitab Uindang-Uindang Pidana?

Hasil penelitian: Hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum karena hukum ini merupakan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia. Penerapan masa percobaan dalam hukuman mati

memiliki implikasi yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa para penggiat hukum selalu mendasarkan pendapat pro dan kontra mengenai pidana mati dengan alasan yang rasional dan logis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Pelaksanaaa hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga di kalangan pemikir-pemikir ahli hukum pidana. Masih banyak dari mereka menilai tidak tepat pidana mati dijadikan salah satu sanksi pidana oleh karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM (hak hidup bagi pelakunya) dan juga pidana mati tidak sejalan dengan prinsipprinsip pemidanaan itu sendiri dimana salah satu prinsipnya resosialisasi atau memasyarakatkan terpidana.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun: Dalam skripsi pembanding hanya membahas mengenai pengaturan masa percobaan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai implikasinnya saja dan tidak ada sudut pandang prespektif hak asasi manusia didalamnya sedangkan pada penelitian hukum yang akan saya susun menekankan pada pidana mati dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, dan untuk mengetahui apakah pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memiliki perkembangan hak asasi manusia.

3. Azzahra sifa Anarki, 30302000073, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023. Judul Skripsi: "Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undangg Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Asas Keadilan Dan Asas Kepatian Hukum."

   Rumusan masalah:

1. Bagaimana perbandingan sanksi pidana mati dalam pembaruan KUHP- 2023 dan KUHP Belanda yang masih berlaku saat ini?
2. Bagaimana penerapan asas keadilan dan asas kepastian dalam pelaksanaan hukum sanksi pidana mati dalam pembaruan KUHP-2023?

   Hasil penelitian; Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan sanksi pidana mati dalam pembaruan KUHP-2023 dan KUHP Belanda yakni KUHP-2023 mengatur secara lebih rinci dan lebih lengkap. Namun tidak memiliki perbedaan signifikan, sebab sanksi pidana yang diatur dalam KUHP juga selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Sebagaimana mengacu pada Pasal 53 KUHP-2023 maka keadilan haruslah lebih diutamakan dibandingkan dengan kepastian hukum.

   Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun: Dalam skripsi pembanding hanya ditinjau dari asas keadilan dan kepastian hukum sedangkan pada penelitian hukum yang akan saya susun menekankan pada

pidana mati dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, dan untuk mengetahui apakah pengaturan baru dalam KUHP 2023 telah memiliki perkembangan hak asasi manusia.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan kesesuaian dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Pidana mati menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati berarti "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif".[11]
2. Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Selain itu HAM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala peraturan yang dibentuk oleh negara dalam rangka melindungi HAM.[12]

---

[11] Presiden Republik Indonesia, 2023, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 nomor 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no 16100, hlm.1–345.

[12] H. Abustan, 2021, *Hak Asasi Manusia Isu-Isu Kritis & Kontekstualitas Nilai-Nilai HAM*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 74.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan terkait dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan mengkaji peraturan perundangan yang mengatur tentang Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada khususnya ditunjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum.

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, kamus dan internet. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji atau menganalisis bahan bahan hukum primer yang berhubungan dengan pidana mati dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada khususnya ditunjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama atau bahan hukum yang mengikat bagi subyek hukum yang meliputi:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
4) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau tidak mengikat bagi subyek hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, serta hasil penelitian.

2. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dengan

cara menelaah, menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang dikaji terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatig hukum yaitu:

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait pidana mati dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada khususnya ditunjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal terdapat ketidak sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang pidana mati dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada khususnya ditunjau dari prespektif Hak Asasi Manusia. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan

perundang-undangan. Sistemasi secara horizontal tidak ditemukan adanya sinkronisasi, karena pasal demi pasal telah antara HAM dan pidana mati mengatur hal yang tidak sama perihal penjatuhan pemidanaan ditinjau dari prespektif HAM.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang-undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Intepretasi hukum positif Ada enam intepretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu:

a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.

c) Teleologi yang setiap intepretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pidana mati yang ditinjau melalui prespektif HAM dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 hukuman mati terhadap kejahatan narkotika ditinjau dari prespektif HAM.

b. Analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencari perbedaan dan persamaan dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, serta hasil penelitian

c. Analisis data dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis kualitatif yaitu analisis data yang sifatanya non-statistik dan non matematis dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan,-undangan .Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan asas-asas hukum,teori, pendapat ahli dan peraturan perundangan yang relevan dengan kajian objek penelitian ini, ,kemudian disusun menjadi bentuk laporan penelitian sehingga dapat disimpulkan kebenaran dan mampu memberikan gambaran faktual terkait objek penelitian ini dengan penarikan simpulan menggunakan metode berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan merumuskan latar belakang yang memuat mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dalam suatu kalimat tanya yang terdapat pada bagian rumusan masalah. Selanjutnya dalam bab ini dijelaskan mengenai ujuan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Terdapat pula perbandingan

antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang serupa dan dirumuskan dalam keaslian penelitian. Untuk menjawab permasalahan yang diteliti maka diperlukan suatu pisau analisis yang dirumuskan dalam tinjauan Pustaka. Selanutnya untuk menyamakan pemahaman antara penulis dengan pihak lain selain penulis, maka diperlukan adanya Batasan konsep dalam bab ini. Kemudian yang tidak kalah penting dijelaskan juga mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulisan serta sistematika skripsi ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas mengenai analisa hubungan antara variable pertama mengenai tinjauan umum pidana mati, variable kedua mengenai hak asasi manusia, variable ketiga mengenai pidana mati dan hak asasi manusia, yang kemudian memuat pokok-pokok permasalahan yang menjadi kajian berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai apakah pengaturan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat perkembangan HAM.

BAB III : PENUTUP

Terdiri dari:

a. Kesimpulan, utnuk menyimpulkan hasil penelitian.
b. Saran, untuk memberikan masukan-masukan kepada para pihak terkait sehingga permasalahan dapat terselesaikan.